

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hakekatnya tujuan pembangunan nasional dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Demi tercapainya suatu tujuan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. (Kiyai, 2018)

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Sebagai pelaksana pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pemerintah Desa berkewenangan melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada, atau potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan bagian dari otonomi daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem penyelenggaraan pembangunan Indonesia. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 juga mengacu pada dua pola pendekatan yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" bertujuan untuk meningkatkan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) dari pada proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam

menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau yang dilaksanakan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang didalamnya mencakup aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Semua program khusus bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan pedesaan (Poma & Wiryawan, 2021).

Paradigma pembangunan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Lebih lanjut, menurut Laksana, *good governance* menekankan bahwa pemerintah harus mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang (Laksana, 2013: 56).

Pelaksanaan program pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan melalui suatu pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang dapat mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mampu mendorong, memotivasi menciptakan akses agar masyarakat desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini diatur pada pasal 81 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat suatu kegiatan yang didasari oleh keberhasilan suatu perencanaan dan program yang ada di sekitar mereka. Suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, dalam keikutsertaan masyarakat akan mewujudkan keberhasilan pada program-program yang telah dibuat, nantinya program tersebut akan tercapai dengan semestinya. Program-program yang dibuat pasti ada kaitannya dengan pembangunan desa yang melibatkan kehidupan masyarakat. keikutsertaan masyarakatnya sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya pembangunan desa. Masyarakat diharuskan memiliki kesadaran untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan, salah satunya pada pembangunan infrastruktur yang sudah disediakan oleh desa, serta di harapkan adanya suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menciptakan desa yang unggul yang dapat dijadikan contoh dari desa-desa lainnya di kabupaten sumenep ini.

Keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat diperlukan, Untuk itu supaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tinggi, maka masyarakat harus diberdayakan, jadi pemberdayaan masyarakat sangat mendukung keberhasilan pembanguan. (Maryani, 2019).

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sangat menunjang keberhasilan pembangunan desa, karena dalam

pembangunan desa, tentunya disesuaikan dengan keinginan masyarakat, artinya desa tidak serta merta dalam melakukan pembangunan tanpa ada keinginan dan kemauan masyarakat, disinilah partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada pembangunan Infrastruktur seperti: pembangunan jalan paving, jalan aspal, pembangunan selokan air/ Drainase. pada pelaksanaan kegiatan di lapangan ini partisipasi masyarakat Desa Pinggir Papas memang cukup tinggi, terlihat semua masyarakat ikut terjun dalam membantu pekerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran partisipasi masyarakat masih kurang berperan, karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam Musrenbangdes, dan Musdes Khusus, masyarakat hanya tahu saat kegiatan dilapangan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan ada yang kurang pas.

Hal-hal seperti ini biasanya masyarakat dilibatkan dalam partisipasi membangun desa, sehingga masyarakat dapat menyumbang pemikiran dalam perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur seperti pada pembangunan jalan paving, jalan aspal, pembangunan selokan air/ Drainase serta pembangunan yang lainnya, agar ketepatan dalam sosialisasi yang dibangun pada pembangunan infrastruktur menjadi baik dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sangat penting demi peningkatan pembangunan desa.

Sebagaimana observasi awal dilapangan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di Desa Pinggir Papas, masyarakat mengatakan kurang tahu adanya pembangunan tersebut, terutama pada pembangunan jalan paving, jalan aspal, pembangunan selokan air/Drainase. Serta pembangunan yang lainnya yang secara langsung dikerjakan.

Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget dalam tahun anggaran 2021, sebagai bentuk dari perencanaan pembangunan desa, sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Pembangunan i Infrastruktur i Desa Pinggir Papas

No	Pembangunan	Volume	Lokasi
1.	Pembangunan Jalan Aspal	47,5 Meter	Ds. Kauman 01/01
2.	Pembangunan Jalan Rabat	29,5 Meter	Ds. Kauman 01/01
3.	Pembangunan Jalan paving	77 Meter	Ds. Kauman 07/02
4.	Pembangunan TPT	34	Ds. Ageng 08/04
5.	Pembangunan TPT & Rabat	17 Meter	Ds. Kauman 04/01
6.	Pembangunan Jalan Rabat	228 Meter	Ds. Dhalem 01/05
7.	Pembangunan Jembatan	1 unit	Ds. Kauman 06/02
8.	Pembangunan Jembatan	1 unit	Ds. Ageng 08/04
9.	Pembangunan Selokan Air/Drainase	23,5 Meter	Ds. Kauman 05/02
10.	Pembangunan Selokan Air/Drainase	126 Meter	Ds. Dhalem 04/06
11.	Pembangunan Gorong-Gorong	2,5 Meter	Ds. Ageng 08/04
12.	Normalisasi Sungai	177 Meter	

Sumber : Pemdes Pinggir Papas, 2021

Data diatas menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pinggir Papas yang melibatkan masyarakat, karena keadaan lokasi yang tahu masyarakat sebagai penghuni di wilayahnya.

Namun hal yang demikian, partisipasi masyarakat kurang dilibatkan mulai dari perencanaan terutama pada Musdes Khusus Desa, sampai pada

pelaksanaan pembangunan, karena Pemerintah Desa hanya bisa melihat secara global keadaan desa, tetapi masyarakat yang secara langsung mengetahui keadaan yang akan dibangun, dengan keterlibatan masyarakat pembangunan akan lebih baik dan berdaya bagi masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, peran serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a). Adanya penelitian ini di harapkan menambah rasa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Pinggir Papas serta dapat memberikan masukan dan dorongan.
- b). Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi dan lembaga Pendidikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a). Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

b). Bagi Pembaca

Mengetahui lebih jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dalam menunjang kebutuhan masyarakat agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penelitian dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam penelitian sehingga pembaca mampu memahami dan mudah untuk membaca hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang relevan dan juga memuat *grand theory* yang akan diterapkan sebagai pegangan dalam penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan fokus penelitian, Lokasi Penelitian dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisa Data

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai keadaan dan kondisi umum dari objek penelitian Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian sesuai fokus penelitian maupun melakukan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.